

Implementasi Kurikulum 2013: Bagaimana Kapasitas Multi-Aktor?

Yoserizal Yoserizal¹, Tri Samnuzulsari²

¹Program Studi Administrasi Publik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

²Program Studi Sosiologi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Article History</p> <p>Submitted: 1 Maret 2022 Revised: 10 Mei 2022 Accepted: 25 Juni 2022 Available online: 30 Juni 2022</p> <p>Correspondence</p> <p>Yoserizal Yoserizal Email: jarjisyoerizal@gmail.com</p>	<p>Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kurikulum 2013. Fokus penelitian ini adalah menjelaskan kapasitas kelembagaan para aktor yang terlibat dalam implementasi kurikulum 2013 di Kota Taneman, Kepulauan Rantau. Pendekatan studi kasus digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Data dikumpulkan melalui wawancara terhadap guru dan kepala sekolah, pejabat di Dinas Pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Penelitian ini menemukan bahwa rendahnya kapasitas aktor-aktor pelaksana kebijakan Kurikulum 2013 telah menyulitkan pencapaian tujuan kurikulum 2013. Implikasi teoritis, praktis, dan metodologis dari penelitian ini diuraikan lebih lanjut dalam artikel ini.</p> <p>Kata Kunci: Implementasi; Kurikulum 2013; Kapasitas; Aktor</p>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
© Inspire Kepri Publication, 2021



Pendahuluan

Studi ini menganalisis implementasi kurikulum 2013 di tingkat lokal di Indonesia. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kapasitas kelembagaan multi-aktor yang terlibat dalam proses implementasi kurikulum 2013. Penelitian ini dilakukan karena perubahan kurikulum 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi kurikulum 2013. Namun kenyataannya, implementasi kurikulum 2013 belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, merupakan masalah yang menarik untuk dianalisis; bagaimana kapasitas kelembagaan dari semua aktor dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Kapasitas kelembagaan didefinisikan sebagai hubungan antara konteks kelembagaan, aktor, dan capaian implementasi (Healey, 1998).

O'Donnell (2008) berpendapat bahwa kurikulum adalah, "materi yang eksplisit, yang disusun secara sadar, dan direncanakan secara formal dengan tujuan spesifik". Kurikulum adalah titik penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Di tingkat mikro, kurikulum adalah instrumen penting untuk membangun karakter dan pengetahuan siswa (Ball & Cohen, 1996; Maton, 2009). Namun, di tingkat makro, kurikulum adalah alat untuk menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar.

Kurikulum adalah alat politik untuk mengeksekusi kekuatan rezim politik di bidang pendidikan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum pendidikan. Di beberapa negara, proses mengubah kurikulum sangat tergantung pada keputusan politik pemerintah. Transformasi kurikulum, dari kurikulum lama ke kurikulum baru, ditentukan oleh acara-acara politik di mana ada tarik-

menarik kepentingan politik legislatif, pemerintah, dan sekolah-sekolah. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum pendidikan harus memperhatikan kepentingan nasional.

Secara praktis, transformasi sistem pendidikan dan dinamika perkembangan global adalah alasan utama pemerintah untuk memperbaiki kurikulum. Di era globalisasi, kurikulum dan pengajaran harus dapat diadaptasi (Gough, 1999; Winter, 2012). Di Indonesia, landasan hukum yang digunakan oleh pemerintah adalah UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kota Taneman telah menerapkan kurikulum 2013 sejak 2014. Ada 915 sekolah dasar, 337 sekolah menengah pertama, 121 sekolah menengah atas, 98 sekolah menengah kejuruan, 4 Madrasah Ibtidaiyah, 2 Madrasah Tsanawiyah, dan 2 Madrasah Aliyah di Taneman. Hari ini, mereka telah benar-benar menerapkan kurikulum 2013. Namun, ada banyak masalah dalam implementasi kurikulum 2013 sehingga peneliti tertarik pada kasus ini.

Table 1. Implementasi Kurikulum 2013 di Provinsi Kepulauan Rantau

Kabupaten/Kota	Sekolah Dasar	SMP	SMA	SMK
Kota Taneman	69	27	12	11
Kota Basaka	332	145	51	56
Kabupaten Karimata	135	50	17	9
Kabupaten Linau	137	37	11	5
Kabupaten Nabani	79	21	14	6
Kabupaten Bantam	97	32	11	8
Kabupaten Anamus	66	25	5	3
Total	915	337	121	98

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Taneman (2018)

Banyak ahli telah membahas implementasi kurikulum. Sudut pandang studi mereka mencakup masalah; reformasi kurikulum (Cheung & Wong, 2012; Karavas-Doukas, 2009), konten kurikulum (Remillard, 1999), and persepsi guru terhadap kurikulum (Kim et al., 2013). Penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan dalam literatur yang ada kapasitas multi-aktor dalam menerapkan kurikulum 2013. Ada dua *novelty* yang ingin dicapai dari penelitian ini. *Pertama*, penelitian ini berkontribusi pada studi implementasi kebijakan, terutama diskusi tentang kapasitas kelembagaan implementasi multi-aktor. *Kedua*, penelitian ini memberikan kontribusi berharga bagi studi kebijakan kurikulum pendidikan. Secara praktis, studi ini berguna bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas implementasi kurikulum 2013.

Metode

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang kapasitas kelembagaan multi-aktor. Implementasi kurikulum 2013 di sekolah umum dianalisis dalam penelitian ini. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus tunggal yang dilakukan di Kota Taneman, Provinsi Kepulauan Rantau. Nama daerah (kota/kabupaten/provinsi) dalam artikel ini bukan nama sebenarnya dan sengaja disamarkan untuk menjaga kerahasiaan lokasi dan informan sesuai permintaan dari partisipan penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara. Para peneliti dan orang yang diwawancarai melakukan wawancara tatap muka. Sebelum proses wawancara, para peneliti memproses surat izin penelitian di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Kota Taneman. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara yang disiapkan sebelumnya. Peneliti menggunakan perekam suara dan catatan buku untuk membantu proses transkrip data. Selama proses wawancara, peneliti bertanya tentang implementasi kurikulum 2013. Selanjutnya, peneliti mengeksplorasi pengaturan kelembagaan dan kapasitas semua aktor dalam menerapkan kurikulum 2013.

Subjek penelitian ini dikumpulkan dengan teknik *purposive sampling*. Peneliti memilih jenis pengambilan sampel untuk memenuhi tujuan penelitian, serta untuk membuat para peneliti mampu

mewawancarai para peserta. Informan terdiri dari guru, kepala sekolah, siswa, dan pembuat kebijakan di sekolah umum dan swasta, Dinas Pendidikan Kota Taneman, dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Kepulauan Rantau.

Sebelum proses analisis data, peneliti melakukan pengkodean data. Hal itu berguna untuk membantu dalam menafsirkan data. Data dianalisis dengan mengkode, menampilkan, dan menganalisis data. Dalam proses pengkodean, peneliti menggunakan pengkodean simultan. Pengkodean bertujuan untuk menyederhanakan data dalam kode tertentu (Yudiatmaja et al., 2021). Data ditampilkan dalam bentuk sederhana, misalnya kutipan, tabel, gambar, grafik, dan lain-lain. Kemudian, peneliti menganalisis data di mana para peneliti memberikan makna yang signifikan terhadap hasil wawancara. Proses analisis data sangat terkait dengan masalah dan fokus penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah dan Perkembangan Kurikulum di Indonesia

Di Indonesia, kurikulum untuk siswa berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu. Karena politik pendidikan yang diambil oleh pemerintah, transformasi kurikulum pendidikan berubah dengan cepat sepanjang sejarah Indonesia. Sampai hari ini, Indonesia telah menerapkan sembilan kurikulum dalam 70 tahun terakhir, yaitu kurikulum 1947, 1952, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Kurikulum telah berubah untuk mengikuti perkembangan dan situasi yang terjadi saat ini. Kurikulum pertama yang diterapkan setelah kemerdekaan Indonesia adalah kurikulum 1947. Kurikulum yang dimulai pada tahun 1950 ini dikenal sebagai "Rentjana Pelajaran 1947". Kurikulum 1947 bertujuan untuk mengubah kurikulum Belanda dan mengembangkan sistem pendidikan yang lebih cocok dengan karakter Indonesia. Mengembangkan kurikulum sendiri di era ini bertujuan untuk mencapai kemerdekaan nasional dan mengembangkan masyarakat pedesaan dengan menginternalisasi nilai-nilai patriotisme. Secara umum, isi kurikulum 1947 terdiri dari dua komponen, yaitu daftar mata pelajaran dan waktu belajar, dan garis besar kursus.

Pada tahun 1952, terjadi transformasi kurikulum. Pada waktu itu dibentuk kurikulum baru dengan nama, "Rentjana Pelajaran Terurai 1952". Kurikulum 1952 membawa perubahan pada sistem pendidikan pada waktu itu karena berfokus pada pengembangan konten dan mata pelajaran yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Kurikulum terdiri dari mata pelajaran, alokasi waktu belajar, materi pembelajaran, dan evaluasi.

Pemerintah berusaha mereformasi sistem pendidikan. Pemerintah mengembangkan program "Rentjana Pendidikan 1964". Kurikulum ini berfokus pada sistem pembelajaran Pancawardhana. Pancawardhana adalah pendidikan yang berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan kepribadian. Keunikan Pancawardhana ditandai dengan menekankan pada nasionalisme siswa untuk memenuhi tujuan revolusi Indonesia.

Pemerintah belum puas dengan implementasi kurikulum 1984. Kemudian, digantikan dengan kurikulum 1994. Kurikulum 1994 diimplementasikan pada saat Wardiman Djoyonegoro menjadi menteri pendidikan. Ada beberapa karakteristik kurikulum 1994, yaitu kurikulum berbasis tujuan, nama SMP (Sekolah Menengah Pertama) diganti dengan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), subjek PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa) dan keterampilan dihapus, program pengajaran dirumuskan dalam 13 mata pelajaran, nama SMA (Sekolah Menengah Atas) ditransformasikan dengan SMU (Sekolah Menengah Umum), program pengajaran di SMU diatur dalam 10 mata pelajaran, penentuan jurusan di SMU dimulai di kelas dua, ada 3 jurusan (ilmu alam, ilmu sosial, dan bahasa).

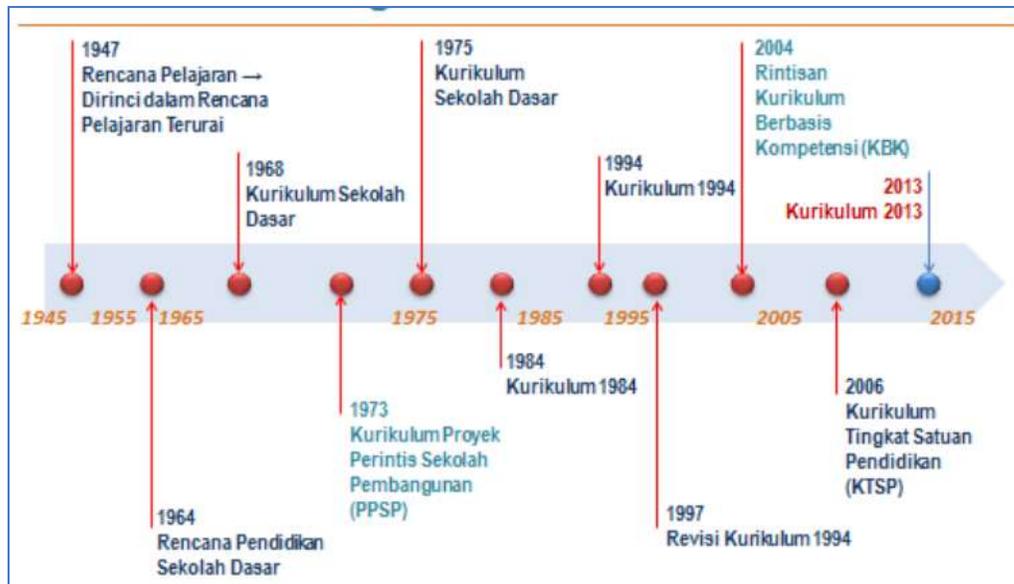
Kurikulum 2013 diterapkan di sekolah pada tahun akademik 2013/2014 untuk sekolah tertentu (terbatas). Kurikulum 2013 secara resmi diluncurkan pada 15 Juli 2013 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara, di Kementerian Agama dimulai pada Juli 2014. Kurikulum terakhir dan sekarang memiliki beberapa perbedaan. Pada dasarnya, kurikulum pada tahun 2013 mirip dengan kurikulum 2006. Namun, kurikulum ini memiliki perbedaan dengan kurikulum 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan (KTSP). Ada beberapa perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum 2006. Berikut ini adalah perbedaan diantara keduanya.

Tabel 2. Perbedaan KTSP dan Kurikulum 2013

KTSP	Kurikulum 2013
Standar konten ditentukan oleh Permendiknas No. 22 Tahun 2006. Kemudian, ditentukan standar kompetensi lulusan oleh Permendiknas No. 23 Tahun 2006.	Standar kompetensi lulusan ditentukan pertama kali oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 54 Tahun 2013. Kemudian, pemerintah menentukan standar konten, yang memuat Kerangka Dasar Kurikulum sebagai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 67, 68, 69, 70 Tahun 2013
Lebih fokus pada aspek pengetahuan	Terdapat keseimbangan antara soft-skill dan hard-skill yang terdiri dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan
Untuk siswa sekolah dasar, program mata pelajaran terintegrasi tematik disampaikan hanya pada kelas 1-3	Untuk siswa sekolah dasar, program mata pelajaran yang terintegrasi secara tempatis disampaikan kepada siswa kelas 1-6.
Total waktu mata pelajaran per minggu lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran jauh lebih banyak daripada kurikulum 2013	Total waktu subyek per minggu jauh lebih banyak dan total subyek lebih sedikit
Menggunakan proses penjelajahan, penjabaran, dan konfirmasi	Menggunakan pendekatan ilmiah (mengamati, bertanya, memproses, menampilkan, menyimpulkan, dan menciptakan)
TIK hanya sebagai subjek	TIK adalah media pengajaran
Evaluasi didominasi oleh dimensi pengetahuan	Menggunakan evaluasi terintegrasi untuk mengukur sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil
Pramuka bukan ekstrakurikuler wajib	Pramuka adalah ekstrakurikuler wajib
Penentuan jurusan dimulai dari kelas XI	Penentuan jurusan dimulai dari kelas X untuk siswa sekolah menengah atas
Peran guru dalam bimbingan konseling adalah untuk memecahkan masalah siswa	Tanggung jawab guru pada bimbingan konseling adalah untuk mengembangkan potensi siswa

Sumber: <http://bdksemarang.kemenag.go.id/the-changing-of-curriculum-from-2006-to-2013/>



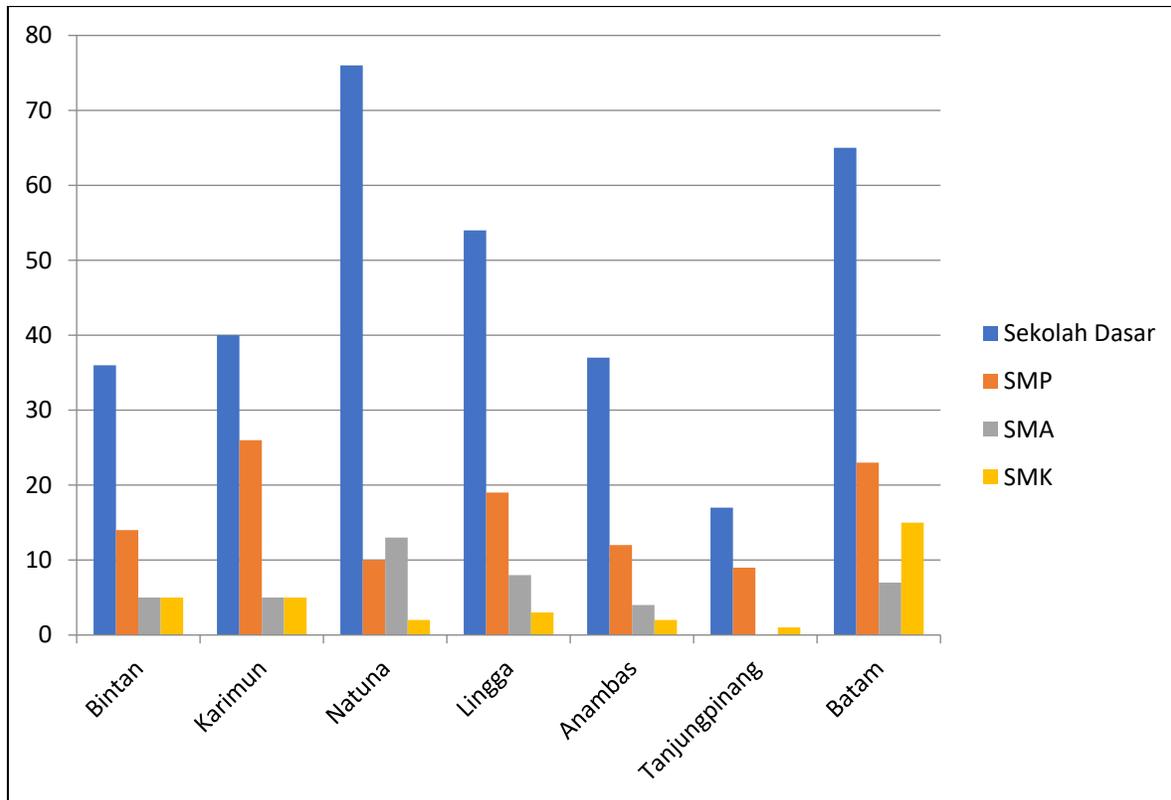
Gambar 1. Perkembangan Kurikulum di Indonesia
(Sumber: Prihantoro, 2015: 79)

Implementasi Kurikulum 2013

Setiap provinsi memperoleh kuota tetap dari sekolah target yang akan menerapkan kurikulum 2013. Sekolah target ditentukan oleh kriteria tersebut, seperti kesesuaian fasilitas dan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Di tingkat provinsi, implementasi kurikulum 2013 di Kepulauan Rantau telah mencapai sekitar 40 persen. Masih ada yang lebih rendah dari provinsi lain yang telah mencapai hampir 70 persen implementasi. Rendahnya capaian implementasi ini terjadi karena instruksi dari pemerintah pusat meminta Pemerintah Kepulauan Rantau untuk menerapkan kurikulum 2013 hanya di sekolah-sekolah pada proyek percontohan.

Saat ini, berdasarkan data dari LPMP Kepulauan Rantau (2018) diketahui bahwa Natuna dan Batam adalah daerah dengan sebagian besar sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 di sekolah dasar. Di sekolah menengah pertama, Karimun memiliki banyak sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 untuk sekolah menengah atas paling banyak dilaksanakan oleh Kabupaten Natuna dan Lingga. Namun, di sekolah kejuruan, Batam memiliki sebagian besar sekolah dalam menerapkan kurikulum 2013 (lihat Gambar 2). Perbedaan antar daerah dalam penerapan kurikulum 2013 terjadi karena adanya perbedaan karakteristik masing-masing daerah.

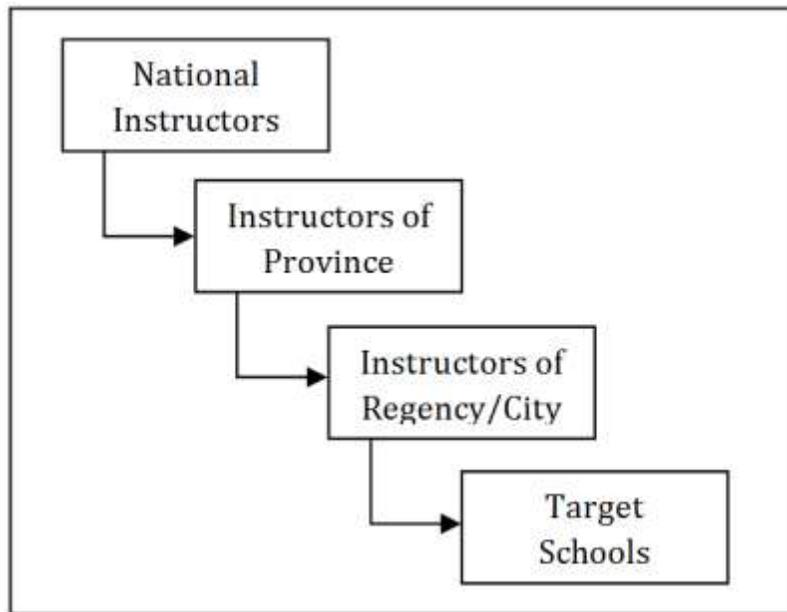
Implementasi kurikulum 2013 di Kota Taneman dimulai pada 2013. Saat itu, ada beberapa sekolah yang menjadi proyek percontohan untuk mengimplementasikan kurikulum 2013, yaitu SMP 8, SMA 1, dan SMK 1 (*wawancara dengan pejabat di Dinas Pendidikan Taneman*). Proses penerapan kurikulum 2013 dihentikan pada tahun 2014 karena penggantian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Penghentian penerapan kurikulum 2013 hanya pada sekolah yang baru memulai kurikulum 2013. Hampir semua sekolah telah menerapkan kurikulum 2013, baik sekolah negeri maupun swasta di Kota Taneman. Penerapan kurikulum 2013 di Taneman dilakukan langkah demi langkah, dimulai dari penunjukan sekolah sasaran, pelatihan guru, dan proses pembelajaran. Di tingkat sekolah dasar, implementasi kurikulum 2013 telah diterapkan di semua sekolah di Taneman.



Gambar 2. Implementasi Kurikulum 2013 di Provinsi Kepulauan Rantau Berdasarkan Tingkat Satuan Pendidikan (Sumber: LPMP Kepulauan Rantau, 2017)

Proses implementasi kurikulum 2013 dimulai dari pelatihan guru. Berdasarkan wawancara dengan pejabat LPMP Kepulauan Rantau, ia mengatakan bahwa seluruh guru harus mengambil bagian dalam program pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pusat atau daerah. Pelatihan diberikan untuk semua tingkatan sekolah, yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kurikulum 2013 diimplementasikan secara bertahap.

Proses pelatihan dilakukan secara bertahap ke setiap instruktur. Instruktur adalah orang yang akan bertanggung jawab untuk melatih instruktur dan guru lainnya. Praktiknya adalah tentang kebijakan umum kurikulum 2013 dan bagaimana cara menyampaikannya. Pertama kali, ada pelatihan untuk instruktur nasional di Jakarta. Tanggung jawab instruktur nasional adalah melatih instruktur provinsi. Pelatihan kedua disampaikan untuk instruktur provinsi. Pesertanya terdiri dari para guru yang ditunjuk oleh LPMP Kepulauan Rantau. Pelatihan untuk instruktur provinsi dilakukan sesuai dengan sistem yang dibagi regional. Pelatihan untuk instruktur di Kota Taneman dilakukan di Medan. Setelah menyelesaikan pelatihan regional, tugas instruktur provinsi adalah melatih instruktur kabupaten atau kota di wilayah mereka. Jadi, ada pelatihan untuk instruktur kabupaten atau kota di setiap provinsi. Terakhir, ada pelatihan untuk guru target. Pelatihan ini diberikan oleh instruktur kabupaten atau kota kepada guru sekolah yang ditunjuk sebagai pelaksana kurikulum 2013. Proses pelatihan para guru dapat dilihat pada Gambar 3.



**Gambar 3. Proses *Training of Trainee* Kurikulum 2013
(Sumber: LPMP Kepulauan Rantau, 2018)**

Ada tiga lembaga yang bertanggung jawab untuk menerapkan kurikulum 2013 di Taneman, yaitu sekolah, Dinas Pendidikan Kepulauan Rantau, Dinas Pendidikan Kota Taneman, dan LPMP Kepulauan Rantau. Setiap lembaga memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam menerapkan kurikulum 2013. Sekolah adalah pelaksana lapangan dalam menerapkan kurikulum 2013 di sekolah-sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta. Peran sekolah adalah untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 sesuai dengan pedoman pemerintah. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Rantau berperan sebagai koordinator program dan bertanggung jawab untuk mengatur semua Dinas Pendidikan di wilayah Kepulauan Rantau. Tugas Dinas Pendidikan Kota Taneman adalah mengoordinasikan semua sekolah sehingga mereka dapat mencapai tujuan kurikulum 2013, yaitu guru, sekolah, dan siswa. Sementara itu, peran LPMP Kepulauan Rantau membantu dalam konsultasi kurikulum 2013 untuk semua sekolah di Kepulauan Rantau. LPMP Kepulauan Rantau adalah lembaga yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan sekolah.

Dalam proses implementasi kurikulum 2013, LPMP Kepulauan Rantau mendirikan sekolah-sekolah kluster. Sekolah kluster adalah gabungan dari beberapa sekolah terdekat. LPMP Kepulauan Rantau memberikan pelatihan bagi para guru di sekolah-sekolah kluster. Di SD, pelatihan diberikan hanya untuk guru kelas 1 dan kelas 4, kepala sekolah, guru agama, dan guru sebagai Setelah dilatih, mereka diwajibkan menerapkan kurikulum 2013 di sekolah mereka. Semua masalah yang terjadi dalam menerapkan kurikulum 2013 dapat didiskusikan di sekolah kluster. Mereka dapat berkonsultasi satu sama lain untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi terkait dengan praktik implementasi kurikulum 2013.

Masalah besar dalam menerapkan kurikulum 2013 di Kota Taneman adalah kapasitas masing-masing aktor dalam mengaktualisasikan fungsi mereka. Hampir semua aktor yang terlibat dalam implementasi kurikulum 2013 ini tidak memiliki kapasitas yang memadai dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Di level provinsi, LPMP Kepulauan Rantau belum memiliki standar dan prosedur operasional yang lengkap mengenai tata cara pelatihan dan pembekalan guru di sekolah kluster. Pemilihan dan pengelompokan sekolah klusterpun sangat bias kota, sehingga sekolah-sekolah yang ada di pulau-pulau terpencil termarginalkan dalam pembentukan sekolah kluster. Di level kota, Dinas Pendidikan Kota Taneman juga tidak responsif terhadap perubahan kurikulum dari KTSP menjadi kurikulum 2013. Dinas Pendidikan Kota Taneman belum memiliki kapasitas yang memadai dalam mengkoordinasikan tiga elemen penting dalam

implementasi kurikulum, yaitu guru, siswa, dan sekolah. Akibatnya, yang terjadi kemudian adalah Dinas Pendidikan hanya menjadi unsur administratif dan penunjang dalam implementasi kurikulum 2013. Di level sekolah, banyak sekolah yang teragap dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 karena terlalu cepatnya transformasi kurikulum. Selain itu, ketidaksiapan fasilitas dan sarana pendukung membuat pihak sekolah menjadi semakin kewalahan dalam mengimplementasikan kurikulum 2013, terutama sekolah-sekolah yang ada di pelosok kota.

Di level pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum memiliki strategi yang memadai dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013. Dalam perspektif Kementerian Pendidikan, implementasi Kurikulum 2013 hanya disederhanakan sebagai masalah teknis dan administratif belaka. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika langkah yang diambil oleh pemerintah hanya sekadar mendesain buku, mendistribusikannya, dan melatih para guru. Sementara, aspek yang terpenting dari Kurikulum 2013, yaitu siswa, belum menjadi perhatian serius dari pemerintah. Pemerintah pusat adalah lembaga paling penting dalam implementasi kurikulum 2013 ini karena mekanisme implementasinya terlanjur *top-down*. Hasil penelitian ini mendukung temuan Bjork (2004) yang menganalisis peranan pemerintah pusat dan kapasitas pemerintah lokal dalam implementasi kurikulum muatan lokal di Indonesia. Dari hasil kajiannya, Bjork juga menyimpulkan pemerintah pusat memegang kendali utama dalam implementasi kurikulum.

Pada level individual, para guru hanya menempatkan implementasi kurikulum 2013 sebagai faktor teknis tentang bagaimana menerjemahkan tujuan dan sasaran implementasi pada kelompok sasaran (*target groups*). Mereka tidak ambil pusing dengan kesiapan infrastruktur dan kapasitas siswa dalam menerima kurikulum yang sama sekali baru. Padahal, sebagaimana temuan studi ini, banyak siswa yang kesulitan memahami kurikulum 2013 karena kurikulum baru lebih berorientasi kepada siswa (*student center learning*). Para guru juga tidak terlalu peduli dengan hasil dan dampak yang diakibatkan dari implementasi kurikulum 2013. Para guru ini cenderung menganggap bahwa kurikulum 2013 adalah program nasional. Jadi, mereka berasumsi bahwa keberhasilan kebijakan ini adalah masalah pemerintah pusat.

Ketidakpedulian para guru di lapangan telah menyebabkan banyak guru tidak memahami substansi dan filosofi Kurikulum 2013. Mereka hanya bertindak sebagai instrumen pendidikan semata dan tidak mencoba merefleksikan secara teoritis dan praktis kurikulum 2013 kepada para peserta didiknya. Peserta didik hanya diposisikan sebagai objek yang pasif, yang siap menerima materi pelajaran dan standar kurikulum 2013. Temuan penelitian bertolak belakang dengan kajian Troyer (2019), yang mengungkapkan bahwa guru adalah ujung tombak implementasi kurikulum di level terendah. Kemampuan guru, baik secara kognitif maupun afektif menjadi prasyarat utama dalam mengimplementasikan kurikulum di sekolah.

Studi ini memiliki implikasi secara teoritis, praktis, dan metodologis. Secara teoritis, studi ini memperkaya kajian mengenai implementasi kebijakan kurikulum. Dengan menyoroti aspek kelembagaan dari para aktor yang terlibat dalam proses implementasi, studi ini memberikan *insight* mengenai kapasitas kelembagaan implementor kebijakan. Hal ini tidak banyak dikaji oleh studi-studi mengenai implementasi kurikulum sebelumnya. Secara praktis, studi ini memberikan sumbangan kepada *policy makers* agar memperhatikan aspek kelembagaan (*institutions*) dalam proses implementasi kebijakan (Yudiatmaja, Yoserizal, et al., 2022). Temuan studi ini menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam aspek kelembagaan diantara pelaksana kebijakan, baik di level pusat maupun daerah, sehingga pemerintah seharusnya mereformasi sistem dan kelembagaan pelaksana implementasi kebijakan kurikulum 2013. Penting bagi pemerintah, untuk memperkuat kapasitas kelembagaan implementor (Yudiatmaja, 2013, 2016), tidak hanya melalui pelatihan dan pemenuhan standar prosedur operasional, tetapi juga melalui penanaman nilai dan filosofi dari kurikulum 2013. Dari sisi metodologis, penelitian ini berimplikasi terhadap kajian implementasi kurikulum karena penelitian ini murni menggunakan pendekatan kualitatif (Yudiatmaja, Solina, et al., 2022). Hasil studi ini tidak dapat mengeneralisasi kondisi implementasi kurikulum 2013 di seluruh Indonesia karena studi kualitatif sangat terikat dengan konteks wilayah, ruang, dan waktu. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji implementasi Kurikulum 2013, sangat disarankan untuk menggunakan pendekatan multi-metodologi atau pendekatan kuantitatif.

Kesimpulan

Studi ini berupaya mengeksplorasi kapasitas kelembagaan implementor kebijakan kurikulum 2013 di Kota Taneman. Temuan penting kajian ini menunjukkan bahwa pelaksana kurikulum 2013 belum memiliki kapasitas yang memadai dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Keterbatasan kapasitas agen pelaksana bukan hanya terjadi pada level pemerintah pusat, tetapi juga pada level pemerintah daerah. Secara umum, agen pelaksana hanya terjebak kepada aktivitas teknis dan administratif dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Hal ini mengakibatkan terjadinya inefektivitas dalam pencapaian tujuan implementasi kurikulum 2013.

How to cite:

Yoserizal, Y., & Samnuzulsari, T. (2022). Implementasi Kurikulum 2013: Bagaimana Kapasitas Multi-Aktor? *Policy and Social Review*, 2(1), pp. 1-10.

Referensi

- Ball, D. L., & Cohen, D. K. (1996). Reform by the book: What Is—or might be—the role of curriculum materials in teacher learning and instructional reform? *Educational Researcher*, 25(9), 6–14.
- Bjork, C. (2004). Decentralisation in education, institutional culture and teacher autonomy in Indonesia. *International Review of Education*, 50(3–4), 245–262.
- Cheung, A. C., & Wong, P. M. (2012). Factors affecting the implementation of curriculum reform in Hong Kong: Key findings from a large-scale survey study. *International Journal of Educational Management*, 26(1), 39–54.
- Gough, N. (1999). Globalization and school curriculum change: Locating a transnational imaginary. *Journal of Education Policy*, 14(1), 73–84.
- Healey, P. (1998). Building institutional capacity through collaborative approaches to urban planning. *Environment and Planning*, 30(9), 1531–1546.
- Karavas-Doukas, E. (2009). Teacher identified factors affecting the implementation of an EFL innovation in Greek public secondary schools. *Language, Culture and Curriculum*, 8(1), 53–68.
- Kim, M., Tan, A. L., & Talaue, F. T. (2013). New vision and challenges in inquiry-based curriculum change in Singapore. *International Journal of Science Education*, 35(2), 289–311.
- Maton, K. (2009). Cumulative and segmented learning: Exploring the role of curriculum structures in knowledge-building. *British Journal of Sociology of Education*, 30(1), 43–57.
- O'Donnell, C. L. (2008). Defining, conceptualizing, and measuring fidelity of implementation and its relationship to outcomes in K–12 curriculum intervention research. *Review of Educational Research*, 78(1), 33–84.
- Prihantoro, C. R. (2015). The perspective of curriculum in Indonesia on environmental education. *International Journal of Research Studies in Education*, 4(1), 77–83.
- Remillard, J. T. (1999). Curriculum materials in Mathematics education reform: A framework for examining teachers' curriculum development. *Curriculum Inquiry*, 29(3), 315–342.
- Troyer, M. (2019). Teachers' adaptations to and orientations towards an adolescent literacy curriculum. *Journal of Curriculum Studies*, 51(2), 202–228.
- Winter, C. (2012). School curriculum, globalisation and the constitution of policy problems and solutions.

Journal of Education Policy, 27(3), 295–314.

Yudiatmaja, W. E. (2013). *Negara, masyarakat sipil dan kebijakan publik: Studi tentang negosiasi kebijakan dan Program Rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV Kota Padang pascagempa 30 September 2009*. Capiya.

Yudiatmaja, W. E. (2016). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. UMRAH Press.

Yudiatmaja, W. E., Kristanti, D., Prastya, I. Y., Yudithia, Y., Samnuzulsari, T., Suyito, S., & Safitri, D. P. (2021). Social policy on the rural coastal communities: Why the implementation fails? *E3S Web of Conferences*, 232, 1–7. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123202006>

Yudiatmaja, W. E., Solina, E., Prastya, I. Y., Yudithia, Y., & Samnuzulsari, T. (2022). Paid plastic shopping bags policy: What the factors drive the implementation? *Journal of Governance and Public Policy*, 9(1), 13–23. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v9i1.11152>

Yudiatmaja, W. E., Yoserizal, Y., Edison, E., Kristanti, D., Tovalini, K., Samnuzulsari, T., & Malek, J. A. (2022). Adoption of online learning in Indonesian higher education during the COVID-19 pandemic. *The Journal of Behavioral Science*, 17(2), 73–89.